

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1993). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilaksanakan di kesatuan masyarakat pada wilayah tertentu, yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Pembangunan menjadi aspek penting yang dilaksanakan oleh setiap daerah, karena pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi rencana (Cimahi B. K., 2015). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D), penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah merupakan tupoksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi (Bappeda Kota Cimahi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra Wijayanto sebagai Fungsional Umum di Bappeda Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi mempunyai permasalahan yang salah satunya adalah dokumen-dokumen perencanaan belum terintegrasi sehingga menyulitkan dalam melakukan rekap data perencanaan. Dokumen perencanaan adalah dokumen rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berisikan daftar kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun berikutnya, yang berbentuk dokumen fisik dan file dengan *extensi* .xls, .doc, dan .ppt. Dokumen tersebut menjadi penting untuk diintegrasikan untuk memudahkan Bappeda Kota Cimahi dalam melakukan monitoring dan evaluasi saat rencana kerja direalisasikan (Wijayanto, 2016).

Permasalahan data yang belum terintegrasi, berdampak pada penilaian data monitoring dan evaluasi yang salah satu keluarannya adalah peringkat kinerja SKPD. Penilaian data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD berdasarkan realisasi terhadap target indikator kinerja dan realisasi terhadap keuangan yang telah ditetapkan pada rencana kerja. Indikator kinerja dan target menjadi data yang sering ditemukan perbedaan antara dokumen monitoring dan evaluasi dengan rencana kerja. Oleh karena itu, Bappeda Kota Cimahi dalam melakukan penentuan peringkat kinerja masih belum optimal sehingga diperlukan sebuah sistem penilaian data monitoring dan evaluasi hasil renja yang terintegrasi dengan data rencana kerja SKPD (Wijayanto, 2016).

Bappeda Kota Cimahi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kota Cimahi memerlukan pengembangan dari keluaran monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan, untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam penyusunan perencanaan pada lingkup dinas atau perangkat daerah. Pengembangan yang dimaksud adalah melakukan analisis pendalaman terhadap pelaksanaan kegiatan terutama mengenai

kepentingan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD (Wijayanto, 2016). Maka dari itu, peneliti melakukan pengembangan dari sistem monitoring dan evaluasi yang sudah ada, dengan memperhatikan kepentingan kegiatan, yang salah satu keluarannya adalah peringkat kinerja SKPD.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) – *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mengatasi pengukuran situasi pada sebuah areal yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Metode AHP-TOPSIS merupakan perpaduan metode AHP dan TOPSIS untuk menyempurnakan metode AHP biasa, yaitu penyempurnaan terhadap permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sisi subjektif yang cukup banyak. Metode AHP dan TOPSIS digunakan dalam penelitian-penelitian baik ditingkat nasional maupun internasional, berikut merupakan tabel yang menjelaskan penelitian-penelitian terkait AHP dan TOPSIS:

Tabel 1.1 Penelitian dan Metode Terkait

No.	Metode	Data	Kesimpulan	Tahun
1.	AHP-TOPSIS	Tata kelola lahan <i>High Conservation Value</i> di Perkebunan Kelapa Sawit	Metode AHP dan TOPSIS telah berhasil memecahkan masalah pada penentuan lahan <i>High Conservation Value</i> , dan memberikan dampak pada naiknya produktivitas kinerja yang cukup signifikan berdasarkan hasil uji analisis <i>Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service</i> (Rahmanda, 2014).	2014
2.	AHP-TOPSIS	Penilaian penerima	Metode AHP dan TOPSIS dapat digunakan untuk	2010

No.	Metode	Data	Kesimpulan	Tahun
		beasiswa	memecahkan masalah dan dapat digunakan sebagai alat bantu penyeleksian beasiswa dengan perhitungan dua metode tersebut (Manurung, 2010).	
3.	<i>Fuzzy</i> AHP dan <i>Fuzzy</i> TOPSIS	Kualitas pelayanan elektronik pada industri kesehatan.	Bisnis kesehatan perlu meningkatkan fokus pada aspek spesialisasi, interaktifitas, dan tingkat akurasi pelayanan pada keandalan dan responsifitas. AHP dan TOPSIS dikombinasikan dengan fuzzy untuk menangani nilai yang sulit ditentukan oleh manusia (Gülçin Büyüközkan, 2012).	2012
4.	AHP-TOPSIS	Pemilihan pemasok di Perusahaan Kabel	Menggunakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria seperti metode AHP-TOPSIS memberikan pendekatan yang sangat berguna bagi pengguna dalam memilih pemasok terbaik. Kerangka AHP-TOPSIS memberikan arahan dan membantu perusahaan	2013

No.	Metode	Data	Kesimpulan	Tahun
			kabel dalam membangun suatu proses pemilihan pemasok (Emrah Onder, 2013).	
5.	<i>Fuzzy</i> AHP dan TOPSIS	Pemilihan sistem operasi.	<i>Fuzzy</i> AHP merupakan pendekatan yang berguna dalam mengevaluasi beberapa kriteria kompleks yang melibatkan penilaian subjektif dan tidak pasti. TOPSIS adalah metode perankingan terkenal yang dapat dengan mudah untuk digunakan. Integrasi dari kedua metode tersebut memungkinkan pengguna untuk secara efisien memilih sistem operasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan (Serkan Balli, 2009).	2009
6.	TOPSIS	Pengembangan metode TOPSIS dalam hal kewajaran dan keefektifan.	Telah dikembangkan 2 jenis TOPSIS yang terbukti mampu memberikan hasil yang lebih baik (Ying Wang, 2008).	2008
7.	<i>Fuzzy</i> AHP dan TOPSIS	Evaluasi dan seleksi lokasi lokasi	Metode AHP-TOPSIS lebih sederhana dalam hal konsep dan implementasi	2012

No.	Metode	Data	Kesimpulan	Tahun
		pembangkit listrik termal.	dibandingkan dengan metode multi kriteria lainnya (Devendra Choudhary, 2012).	
8.	AHP-TOPSIS	Mendukung metode pengisian puing untuk perusahaan konstruksi.	AHP digunakan untuk melakukan pembobotan terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan dan TOPSIS untuk mengurutkan pilihan-pilihan yang tersedia. Menggunakan metode ini, disimpulkan bahwa manusia dan traktor menjadi pilihan terbaik dalam pengisian puing (Prerana Jakhotia, 2013).	2013

Berdasarkan dari data dan hasil penelitian terkait, penerapan metode AHP-TOPSIS pada data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD Pemerintahan Kota Cimahi untuk menentukan peringkat kinerja dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan di Bappeda Kota Cimahi. Dengan penerapan tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Cimahi dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian yang diangkat adalah “PENERAPAN METODE AHP-TOPSIS PADA DATA MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENENTUKAN PERINGKAT KINERJA”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam menentukan peringkat kinerja SKPD berdasarkan data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD?
2. Bagaimana menerapkan metode AHP untuk menentukan vektor prioritas dalam kriteria-kriteria penentuan peringkat kinerja pada data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD?
3. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS pada proses perhitungan kriteria dengan AHP untuk menentukan urutan peringkat kinerja SKPD?

## 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Data monitoring dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah kumpulan data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD Kota Cimahi Tahun 2015.
3. Integrasi data rencana kerja dan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan upload berkas data berekstensi *.csv* ke dalam sistem.
4. Jumlah data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 SKPD.
5. Kriteria penilaian yang digunakan didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kota Cimahi.
6. Proses yang dilakukan sistem hanya proses perhitungan metode AHP dan TOPSIS untuk menentukan peringkat kinerja SKPD.



7. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pihak Bappeda Kota Cimahi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam menentukan peringkat kinerja SKPD berdasarkan data monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja SKPD.
2. Menerapkan metode AHP untuk menentukan vektor prioritas dalam kriteria-kriteria penentuan peringkat kinerja pada data monitoring dan evaluasi rencana kerja SKPD.
3. Menerapkan metode TOPSIS pada proses perhitungan kriteria-kriteria dengan AHP untuk menentukan urutan peringkat kinerja SKPD.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memudahkan Walikota Cimahi dalam melakukan penilaian terhadap kinerja SKPD sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam mengambil keputusan.
2. Memberikan pertimbangan kepada SKPD pada proses pembuatan rencana kerja pada tahun selanjutnya.
3. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **1.6 Struktur dan Organisasi Skripsi**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian yang akan dilakukan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan tentang Kota Cimahi, Monitoring dan Evaluasi, Sistem Pendukung Keputusan, AHP, dan TOPSIS yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan deskripsi umum tentang analisis metode yang digunakan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan data monitoring dan evaluasi rencana kerja SKPD dan disajikan dalam implementasi.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari BAB IV dan saran yang akan diajukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rekomendasi penelitian selanjutnya.